

PELESTARIAN KAWASAN GUNUNG GUNTUR MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Indriyati Kamil¹, Nantia Rena Dewi Munggaran², Dudi Yudhokusuma³
¹²³Universitas Langlangbuana, Jl Karapitan no 116, Bandung, Indonesia, 081222264897
Rindriya73@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan konservasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan keberadaan masyarakat dan pemerintah daerah di sekitarnya. Salahsatu kawasan konservasi yang mengalami persoalan degradasi adalah Kawasan cagar alam dan taman wisata alam Gunung Guntur. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi proses komunikasi lingkungan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melestarikan kawasan serta mengusulkan model komunikasi dalam penanganan kawasan gunung guntur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi lingkungan dalam melestarikan Kawasan gunung Guntur dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan literasi sadar kawasan kepada warga masyarakat sekitar, kampanye di media sosial tentang tata batas Kawasan konservasi dan melakukan patroli bersama para penggiat alam untuk membangun komunikasi partisipatif. Model komunikasi yang dapat dilakukan untuk penanganan di Kawasan adalah menerapkan komunikasi asertif kolaboratif melalui kemitraan sinergis dan pendekatan komunikasi lingkungan yang terpadu.

Kata Kunci: Komunikasi Lingkungan, Penanganan Kawasan Konservasi, Gunung Guntur

PRESERVATION OF THE GUNTUR MOUNTAIN AREA THROUGH AN ENVIRONMENTAL COMMUNICATION APPROACH

ABSTRACT

Conservation areas in Indonesia cannot be separated from the problem of the existence of the community and local government in the vicinity. One of the conservation areas experiencing degradation problems is the nature reserve area and the Guntur mountain nature park. The purpose of the research is to identify the environmental communication process carried out by the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) in preserving the area and to propose a communication model in handling the thunder mountain area. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. The results showed that the environmental communication process in preserving the Guntur mountain area was carried out by conducting socialization and area-aware literacy to local residents, campaigning on social media about the boundaries of conservation areas and conducting patrols with nature activists to build participatory communication. The communication model that can be used for handling in the Region is to apply collaborative assertive communication through synergistic partnerships and an integrated approach to environmental communication.

Keywords: *Environmental communication, Management of Conservation Areas, Mount Guntur*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA meliputi: taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam), dan Taman Buru.

Gunung Guntur adalah salah satu lanskap penting bagi kawasan prioritas konservasi di Jawa Barat. Lanskap ini berisi keanekaragaman flora dan rumah bagi beberapa spesies satwa unik dan terancam punah, seperti Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Kukang (*Nycticebus javanicus*). dan Macan Tutul Jawa (*CNN Indonesia*, 2019). Dalam aktivitas pengelolaannya, kawasan konservasi mengalami berbagai isu dan permasalahan seperti (Kemenhut, 2011):

- a) Legalitas kawasan konservasi yang masih rendah dan rawan konflik sehingga sulit dilakukan penegakan hukum yang efektif.
- b) Perambahan kawasan konservasi, *illegal logging* dan

perdagangan tumbuhan-satwa liar secara ilegal, wisata massif di Kawasan cagar alam dan kebakaran hutan dan lahan yang mempunyai implikasi akan hilangnya keanekaragaman flora dan fauna.

- c) Belum jelasnya penataan batas dan zona Kawasan konservasi
- d) Kurangnya literasi dan komunikasi lingkungan kepada warga yang tinggal di sekitar Kawasan dan masyarakat luas sehingga pemahaman tentang Kawasan masih rendah.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dinyatakan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Cagar alam dan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Guntur secara geografis terletak pada salah satu kaki Gunung Guntur, dengan koordinat antara 7o8'24'' - 7o9'32'' LS dan 107o52'15'' - 107o53'38'' BT. Gunung Guntur yang tergolong masih aktif dengan aktivitas vulkanik ini memiliki ketinggian 2.00 m dari permukaan laut dengan satu kawah yang terdapat di salah satu puncaknya. Gunung Guntur memiliki karakter bentang alam yang unik yaitu memiliki tiga bukit pada puncaknya, yang

masing-masing bukitnya memiliki ketinggian (dari kaki gunung) 1000 m, 1200 m, dan 1300 m pada puncak paling tinggi. Gunung Guntur memiliki konfigurasi umum lahan bergunung dengan kemiringan lahan yang sangat curam (PHKA, 2004).

Komunikasi lingkungan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bersifat pragmatis, sehingga bentuk komunikasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan (Sulaeman, 2017). Komunikasi lingkungan juga merupakan suatu hal yang memiliki sifat konstitutif dan dapat membantu dalam merepresentasikan tentang alam dan permasalahan lingkungan yang ada dan merupakan subjek pemahaman bagi kita (Desmiwati & Surati, 2017). Dengan membentuk melalui persepsi akan alam, maka komunikasi lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam melihat keanekaragaman sumber daya alam sebagai suatu ancaman atau merupakan peluang dalam kekayaan yang sangat berlimpah dan sebagai pendukung kehidupan kelompok ekosistem (Desmiwati & Surati, 2017) (Lestari, et.al, 2016). Komunikasi lingkungan tidak mudah untuk dilakukan, sehingga diperlukan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dalam menyusun strategi

komunikasi lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan dua arah (Desmiwati & Surati, 2011) (Zuhri & Sulistyawati, 2007).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulaeman (2017) dengan judul penelitian Lingkungan Hutan Suku Naulu: Makna Komunikasi Lingkungan Masyarakat Adat Suku Naulu Kabupaten Maluki Tengah Provinsi Maluku menyatakan bahwa masyarakat Suku Naulu telah melakukan proses komunikasi lingkungan dalam melestarikan ekosistem hutan dan komunikasi lingkungan menjadi bagian dari integral dari ekosistem kehidupannya. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan hutan merupakan salah satu proses dalam mendekati makna – makna yang terjadi di dalam fenomena hutan dan menjadikan hutan sebagai fenomena yang sangat bermakna dengan melibatkan proses komunikasi kepada masyarakat, berlangsung dalam setting tertentu, dan terikat dalam kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian berikutnya terkait Kawasan hutan dilakukan oleh M.Hawari (2019) dengan judul : Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat yang menyatakan bahwa partisipasi warga

sekitar dalam upaya pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan bersama pihak pemerintah dan paguyuban masyarakat melalui beragam instrumen seperti pemasangan papan peringatan, melakukan kerjasama kemitraan dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan. Berbagai uraian tentang hasil penelitian di atas lebih banyak membahas tentang pengelolaan dan perubahan Kawasan dari perspektif ekologi, sosial ekonomi dan kehutanan, tetapi riset yang mengkaji keberlanjutan kawasan konservasi, khususnya penanganan kerusakan Kawasan gunung melalui pendekatan komunikasi masih belum banyak dilakukan sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses komunikasi lingkungan yang dilakukan BKSDA bersama para pemangku kepentingan dalam melestarikan kawasan konservasi Gunung Guntur, serta menemukan model komunikasi untuk penanganan permasalahan di Kawasan CA/TWA Gunung Guntur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Pelestarian Kawasan Gunung Guntur Melalui Pendekatan Komunikasi Lingkungan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana sifat alamiah dari penelitian kualitatif dapat menggambarkan fenomena penelitian secara lebih utuh melalui upaya peneliti dalam berinteraksi dengan para aktor sosial yang diamati. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung dan memaknai hal-hal yang terjadi di dalamnya sebagai bagian yang mencirikan penelitian kualitatif, sebagaimana diungkapkan Creswell (2013) lebih lanjut menjelaskan pendekatan kualitatif melibatkan beberapa upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari data partisipan, menganalisis data secara induktif yang dimulai dari tema yang khusus. Teknik pengolahan data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang berisi tentang reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan merujuk pada peta dari situs *protected planet* (IUCN, 2015) Gunung Guntur merupakan kawasan hutan cagar alam

Kamojang Timur. Kawasan taman wisata alam (TWA) Gunung Guntur hanya meliputi Kawasan Curug Cikoneng dan Citiis. Adapun jalur pendakian hingga puncak gunung Guntur sebagian besar merupakan Kawasan cagar alam, sehingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merubah keutuhan hutan dan menimbulkan kerusakan di Kawasan konservasi tersebut sesuai dengan UU No.5 tahun 1990. Faktanya Kawasan gunung Guntur mengalami kerusakan alam yang cukup parah akibat intervensi manusia.

Kerusakan alam di Kawasan Gunung Guntur tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku masyarakat dalam memandang dan memaknai gunung. Masyarakat masih memperlakukan gunung sebagai sebuah benda mati dan tempat perputaran ekonomi. Padahal, gunung dan hutan mempunyai peran sebagai system penyangga kehidupan. Urgensinya tidak hanya pendekatan ekonomi, tetapi juga aspek ekologi menjadi sangat penting mendapat atensi semua pihak. Salah satu penyebab hilangnya penghargaan manusia terhadap gunung diakibatkan karena terputusnya pengetahuan masyarakat terhadap alam semesta (Pepep DW, 2018).

Relasi antara kerusakan lingkungan dan ancaman bencana merupakan relasi logis yang kerap terjadi.

Salah satu bencana yang diakibatkan oleh kerusakan kawasan adalah tanah longsor, banjir bandang, dan menurunnya kualitas sumberdaya alam bagi kehidupan manusia. Ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, manusia akan mengalami kesengsaraan ketika menghadapi musim kemarau, dan begitu pula ketika menghadapi musim hujan. Gunung dengan kualitas hutan yang terus menurun mengakibatkan hilangnya fungsi penahan laju air kala hujan dan fungsi gentong bumi yang menyimpan pasokan air kala kemarau. Sehingga ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, masyarakat di sekitarnya akan kekurangan air ketika musim kemarau, dan akan mendapat pasokan air berlebih ketika penghujan. Maka kekeringan, banjir dan bandang merupakan konsekwensi logis jika hutan dan gunung-gunungnya dalam kondisi rusak.

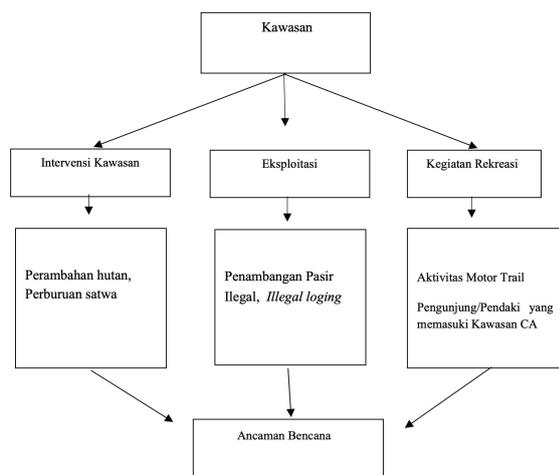
Kerusakan hutan gunung Guntur disebabkan oleh beragam kegiatan destruktif diantaranya penambangan pasir illegal, pendakian di Kawasan yang cagar alam dan aktivitas motor trail yang memasuki kawasan yang dikenal dengan sebutan Sanghyang Buruan. Kegiatan motor trail tersebut menyebabkan sedimentasi tanah sedalam 2 meter. Di Kawasan Taman Wisata Alam Kamojang

Blok Gunung Guntur seluas 150 ha sudah dijadikan tempat galian pasir. Satu sisi panorama indah di kaki Gunung Guntur terancam hilang, air terjun yang terdapat di 3 (tiga) titik tempat sudah punah ditelan kegiatan eksploitasi ilegal oleh para pelaku kejahatan lingkungan, keberadaan sumber mata air pun musnah oleh penambangan pasir liar, kawasan hijau menjadi gersang dan tandus, sehingga berpotensi menimbulkan bencana hidrometrologi dan longsor yang bisa datang kapan saja, dan mengancam keselamatan warga sekitar yang berada dibawahnya serta tempat wisata air panas Cipanas dan pendaki gunung. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, aktivitas penambangan pasir yang terletak di Gunung Guntur dapat mengganggu pengukuran aktivitas kegempaan gunung berapi (PVMBG:2013).

Persoalan mendasar yang terjadi di Gunung Guntur, selain adanya eksploitasi tambang pasir secara masif yang dilakukan oleh para penambang ilegal, adanya perambahan, pembakaran hutan juga aktivitas wisata motor trail, para pendaki gunung serta pengunjung yang membuang sampah dan limbah disekitar kawasan (BKSDA, 2018).

Walaupun sudah ada larangan oleh pemerintah daerah dan BKSDA atas penambangan galian pasir ilegal karena termasuk kawasan rentan bencana, aktivitas penambangan pasir masih terus dilakukan. Aparat Penegak Hukum dalam hal ini haruslah objektif dan tegas untuk melakukan proses hukum bagi para oknum penggali pasir yang diketahui tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan pasir dikawasan tersebut, sebelum terjadi longsor dan banjir yang akan merengut ratusan bahkan ribu jiwa umat manusia, ancaman bahaya abrasi banjir lumpur dan banjir kiriman yang selama ini melanda kawasan Tanjung dan sekitarnya di Kecamatan Tarogong Kaler. Bencana banjir tersebut disebabkan karena hancurnya tanggul penahan lahar, hal ini akibat adanya aktivitas penambangan pasir dan batu di Kaki Gunung Guntur. Ekosistem alam yang terdapat di kawasan Gunung Guntur merupakan sumber potensiekonomi bagi masyarakat sekitar Gunung, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan aktifitas dengan melakukan perambahan di kawasan Gunung Guntur.

Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab kerusakan kawasan Gunung Guntur:



Sumber: Data Penelitian, 2021

Gambar 1. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Akibat penambangan pasir dan intervensi masyarakat terhadap kawasan membuat kawasan Gunung Guntur mengalami fragmentasi dan kerusakan. Ini adalah tantangan besar bagi pemerintah, pemangku kawasan khususnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat untuk melakukan konservasi alam dan pengelolaan hutan khususnya Kawasan Gunung Guntur agar tidak semakin rusak. Penanganan permasalahan kawasan ini perlu dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait, hal ini tentu memerlukan pengelolaan komunikasi lingkungan yang terpadu dan holistik.

Melihat pada berbagai fakta dan kondisi masyarakat yang ada di kawasan Gunung Guntur, maka perlu dilihat ragam perspektif untuk mengkaji lebih dalam persoalan-persoalan dasar yang dihadapi.

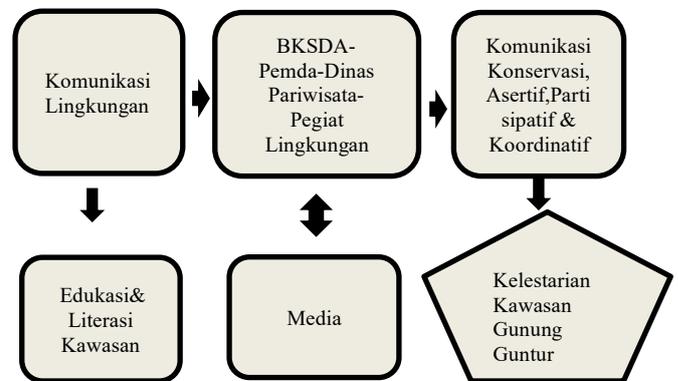
Salah satunya adalah pendekatan Ilmu komunikasi, terutama kajian komunikasi lingkungan. Mengacu pada beberapa definisi komunikasi lingkungan seperti dari Jurin (2010), dan Cox (2010) mengatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sebuah generasi sistematis dan pertukaran pesan manusia dalam, dari, untuk dan tentang dunia di sekitarnya dan interaksi dengan alam.

Komunikasi lingkungan dapat menggugah kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan konservasi secara partisipatif. Komunikasi lingkungan berperan sebagai proses pembelajaran bersama semua pihak untuk membangun koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholders dalam melestarikan kawasan hutan dan pegunungan. Komunikasi lingkungan menurut konsep Floor (2018) adalah sebuah dinamika, prinsip, strategi dan teknik terhadap tata kelola dan perlindungan lingkungan yang menuntut adanya aspek keberlanjutan.

Strategi pengembangan yang dilakukan untuk mendukung penanganan Kawasan CA/TWA Gunung Guntur, sebaiknya wilayah zona perlindungan dikelola secara kolaboratif oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama *stakeholders* dan masyarakat. Dalam mekanisme ini diharapkan seluruh pihak

berkolaborasi dan berbagi peran, sehingga diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kawasan CA/TWA dan mengalokasikan zona pemanfaatan untuk memberi peluang bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan kolaboratif zona pemanfaatan di taman wisata alam sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan KSA dan KPA; dan diperkuat dengan Permenhut nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA. Heywood dan Dulloo (2005) menyatakan, dalam konvensi keanekaragaman hayati konservasi in-situ mengandung arti mempromosikan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi spesies di alam sekitarnya. Pola komunikasi lingkungan untuk merawat kawasan Gunung Guntur terjadi secara interaktif dan bukan hanya menyebarkan informasi maupun pesan – pesan lingkungan, tetapi hendaknya media memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengawasan sosial (*civil society*) dalam konservasi dan kelestarian alam. Gagasan pola komunikasi lingkungan dalam penanganan Kawasan

CA/TWA Gunung Guntur seperti tertuang di dalam Gambar berikut ini :



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Gambar 2. Model Komunikasi Lingkungan dalam Penanganan Kawasan Hutan Gunung Guntur

Di dalam proses komunikasi terdapat beberapa pendekatan komunikasi yang dilaksanakan dalam menjaga dan melestarikan Kawasan konservasi gunung Guntur antara lain:

1. Komunikasi Konservasi

Informasi tentang status kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar alam di kawasan Gunung Guntur perlu di informasikan secara luas kepada masyarakat. Pihak pengelola dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) harus melakukan komunikasi lingkungan tentang keberadaan batas wilayah kawasan hutan, khususnya Taman Wisata Alam dan Cagar Alam yang harus diketahui masyarakat. Kawasan hutan konservasi tersebut harus dilindungi karena fungsinya yang demikian strategis. Sosialisasi tentang batas wilayah

kawasan hutan ini harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya okupasi lahan oleh masyarakat hingga berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan sekitarnya.

2. Komunikasi Asertif

Komunikasi asertif adalah komunikasi yang saling menghargai dan mendorong berkembangnya dialog yang setara dan mendalam, dalam mengupayakan keberlanjutan Kawasan konservasi. Komunikasi dapat dikembangkan melalui forum-forum dialog bulanan dan inisiatif muncul tidak selalu dari pihak pemerintah yang mengundang tetapi masyarakat dapat ikut andil dan berpartisipasi mengagendakan dialog bersama para pihak dengan melakukan identifikasi, pendekatan, dan dialog secara terbuka tetapi intens dengan beberapa pemangku kepentingan. Dalam mengembangkan dialog asertif itu, diperlukan kemampuan komunikasi dalam hal *listening skill*, dan yang lebih penting adalah membangun iklim dialog yang kondusif untuk tumbuhnya saling percaya atau *trust building*. Membangun kepercayaan ini merupakan modal awal berkembangnya hubungan yang lebih mendalam. Tanpa adanya kepercayaan dan frekuensi komunikasi yang tinggi, maka sulit untuk mencapai saling pengertian

diantara para pihak dalam menjaga Kawasan hutan gunung Guntur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu melibatkan para penggiat alam, tokoh masyarakat, *local player*, akademisi dan media untuk pengawalan kawasan, membentuk jaringan dan kerjasama para pihak dengan meningkatkan fasilitator dan komunikator lingkungan untuk advokasi Kawasan konservasi.

Pemangku Kawasan perlu lebih proaktif meningkatkan aktivitas komunikasi lingkungan kepada masyarakat dan pengunjung agar terbangun kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi hutan CA/TWA Gunung Guntur untuk mencegah, membatasi kerusakan kawasan dengan cara melibatkan masyarakat secara inklusi dalam berbagai kegiatan perlindungan hutan. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan edukasi melalui ceramah, diskusi, tanya jawab seputar kawasan konservasi, edukasi dan literasi sadar Kawasan untuk penyelamatan dan perlindungan lingkungan.

3. Komunikasi Partisipatif Masyarakat lokal harus berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam pengelolaan Kawasan konservasi khususnya CA dan TWA gunung Guntur. Para penambang pasir ilegal perlu

diberikan atensi oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat dialih profesikan menjadi pelaku jasa wisata. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan korporasi dan pelaku bisnis untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sektor pariwisata di taman wisata alam diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat lokal untuk dapat mengembangkan usaha mendukung jasa pariwisata seperti pemandu wisata, jasa *home stay*, kerajinan tangan, souvenir, warung makan, dan lain-lain agar masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi yang lebih banyak dari wisatawan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.

4. Komunikasi Koordinatif

Komunikasi Koordinatif dapat dilakukan dengan membangun sinergi dan kerjasama antara pemangku Kawasan di tingkat tapak, pemda, Polisi hutan serta aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para pelaku yang melanggar kawasan, terutama para penambang pasir ilegal yang memasuki cagar alam. Peraturan daerah yang mengatur tentang galian pasir harus lebih tegas, sehingga memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum termasuk aparat yang terlibat sehingga jaringan penambangan pasir liar dapat dihentikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh BKSDA Jawa Barat dengan para pihak antara lain melakukan sosialisasi dan literasi sadar kawasan kepada warga dan masyarakat sekitar, kampanye di media sosial tentang tata batas Kawasan konservasi dan melakukan patroli bersama para penggiat alam dan relawan untuk membangun komunikasi yang bersifat partisipatif. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan massif yang terjadi di kawasan konservasi Gunung Guntur yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir ilegal, intervensi masyarakat terhadap kawasan, aktivitas rekreasi massif dan pendakian ilegal yang memasuki cagar alam.

Strategi komunikasi pihak pemangku kawasan bersama *stakeholders* dalam penanganan Kawasan CA/TWA Gunung Guntur yaitu dengan melakukan komunikasi asertif kolaboratif untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Adanya kolaborasi dan pembagian peran, diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kawasan CA/ TWA serta mengalokasikan zona pemanfaatan untuk membuka peluang

bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Model komunikasi yang cocok diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, adalah dengan cara melakukan komunikasi konservasi, komunikasi asertif yang saling menghargai, komunikasi partisipatif dan komunikasi koordinatif. Komunikasi konservasi dapat dilakukan dengan cara pemberian informasi tentang status kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar alam di kawasan Gunung Guntur, area tata batas kawasan yang boleh dilakukan kegiatan wisata dan area yang dilindungi (*protected area*). Komunikasi asertif adalah komunikasi yang menekankan prinsip saling menghargai dengan misi menyampaikan pesan pesan lingkungan kepada masyarakat untuk tidak melakukan eksploitasi alam, dan menumbuhkan kesadaran menjaga Kawasan untuk keberlanjutan lingkungan. Komunikasi partisipatif adalah bentuk komunikasi lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan pelestarian Kawasan Gunung Guntur melalui pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan bersama. Komunikasi Koordinatif dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kemitraan BKSDA dengan para pihak khususnya penegak hukum dalam memberikan sanksi tegas kepada

para pelaku yang melanggar kawasan, terutama para penambang pasir ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, MH. Syaufina, Lailan. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Wisata Alam Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat*.
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/101247>
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam . (2018). *Data Profil Kawasan Kamojang – Guntur*
- Cox, Robert, 2010, *Environmental Communication and Public Sphere*, Sage Publication, Los Angeles, Washington DC, USA
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. third Edition, Terjemah, Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. (2004). *Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian LHK
- Desmiwati., & Surati. (2017). *Upaya Penyelesaian Masalah Pemantapan Kawasan Hutan Pada Taman Nasional di Pulau Sumatera*. Jurnal Penelitian Kawasan Wallacea. Vol. 6(2)
- Flor, Alexander G., et al. 2018. *Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi*. Jakarta: Kencana

- Heywood, V. H. dan M.E. Dulloo. 2005. *In-situ Conservation of Wild Plant Species: a critical global review of good practices*. IPGRI Technical IUCN. (2015). *IUCN Redlist of Threatened Species ver.3.1*. Diambil kembali dari <http://www.iucnredlist.org>
- Jurin, Richard, dkk, 2010, *Environmental Communications, Skill and Principles for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer*, Springer Doerdrecht Heidelberg, Newyork London.
- Kemenuh Kementerian Kehutanan. 2011. *Rencana Kehutanan Tingkat Nasional RKTNTahun2011-2030* Lampiran dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2011. Jakarta. 28 Juni 2011.
- Lestari, P., Paripurno, E. T., Kusumayudha, S. B., & Ramadhaniyanto, B. (2016). *Komunikasi Lingkungan Untuk Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Sinabung*. Jurnal ASPIKOM. Vol. 3(1)
- Menghargai Kehadiran Macan tutul Jawa Di Papandayan*. Antara,CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20190424104513-269-389126/menghargai-kehadiran-macan-tutul-jawa-di-papandayan> (Di akses pada Tanggal 2 September 2021).
- Menteri Kehutanan. 2004. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/MenhutII/2004 tentang Kolaborasi Identifikasi Manajemen Arief Khoiri Rustandi, Cecep Aminudin, Refial Fadly 43 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam*
- . 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*